

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP ASIMETRI INFORMASI  
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG *LISTING* DI  
BURSA EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



**Oleh:**

**SRI ARMAYANTI**  
**73384/2006**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2010**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP ASIMETRI INFORMASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG *LISTING* DI BURSA EFEK INDONESIA**

NAMA : SRI ARMAYANTI

BP/NIM : 2006/73384

KEAHLIAN : AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Mei 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Lili Anita, S.E, M.Si, Ak**  
**NIP. 19710302 199802 2 001**

**Nelvirita, S.E, M.Si, Ak**  
**NIP. 19740706 199903 2 002**

Mengetahui,  
Ketua Prodi Akuntansi

**Lili Anita, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 19710302 199802 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus  
Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Penerapan *Good Corporate Governance*  
terhadap Asimetri Informasi pada Perusahaan Manufaktur  
yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia**

**Nama** : Sri Armayanti  
**BP/NIM** : 2006/73384  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, Mei 2010**

**Tim Penguji**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Ketua	Lili Anita, S.E, M.Si, Ak	1. _____
2.	Sekretaris	Nelvirita, S.E, M.Si, Ak	2. _____
3.	Anggota	Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak	3. _____
4.	Anggota	Charoline Cheisviyanny, S.E, M.Ak	4. _____

## ABSTRAK

- Sri Armayanti** : **Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Asimetri Informasi pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2010.**
- Pembimbing** : **1. Lili Anita, S.E, M.Si, Ak**  
**2. Nelvirita, S.E, M.Si, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap asimetri informasi, 2) Penerapan *good corporate governance* terhadap asimetri informasi.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Pemilihan sampel dengan metode *Simple Random Sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji t untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan dan penerapan *good corporate governance* terhadap asimetri informasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi, dimana nilai signifikansi  $0.00 < 0.05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2.014 > 1.6537$  ( $H_1$  diterima), 2) Penerapan *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi, dimana nilai signifikansi  $0.00 > 0.05$  dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1.083 < 1.6537$  ( $H_2$  ditolak).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi investor sebaiknya memperhatikan faktor ukuran perusahaan dan penerapan *good corporate governance* perusahaan apakah telah memenuhi kebutuhan informasi dalam analisis investasi. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Sebaiknya menambah *proxy* untuk mengukur *good corporate governance*, seperti menggunakan komite audit, kepemilikan manajerial, menggunakan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikemukakan oleh IICG atau menggunakan indeks yang dikeluarkan oleh CGPI. Dengan melihat nilai *Adjusted R Square* penelitian yang masih rendah, maka disarankan untuk menambah variabel independen lain terhadap asimetri informasi seperti regulasi pengungkapan, manajemen laba, *leverage*, dan pengumuman laba.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Asimetri Informasi pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia.” Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak sebagai Pembimbing I dan Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ibu dan Ayah, Ayuk dan Kakak-kakak serta seluruh Keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril maupun materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, penulis mohon maaf. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Mei 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Perumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
<b>DAN HIPOTESIS</b> .....	13
A. Kajian Teori .....	13
1. Asimetri Informasi dan Teori <i>Bid-Ask Spread</i> .....	13
a. Pengertian Asimetri Informasi.....	13
b. Teori <i>Bid-Ask Spread</i> .....	18
2. Ukuran Perusahaan .....	21
3. <i>Good Corporate Governance</i> .....	24
a. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	24
b. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	26

c. Kode <i>Good Corporate Governance</i> .....	30
d. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> .....	33
e. Komisaris Independen .....	34
4. Hasil Penelitian yang Relevan .....	39
5. Hubungan Ukuran Perusahaan dan Asimetri Informasi .....	40
6. Hubungan <i>Good Corporate Governance</i> dan Asimetri Informasi .....	41
B. Kerangka Konseptual.....	42
C. Hipotesis .....	44
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Populasi dan Sampel .....	45
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Variabel Penelitian.....	49
F. Pengukuran Variabel.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Definisi Operasional .....	55
<b>BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	57
A. Temuan Penelitian .....	57
1. Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur di Indonesia .....	57
B. Deskriptif Variabel Penelitian.....	58
1. Analisis Deskriptif .....	58
2. Statistik Deskriptif .....	66
3. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	68

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	71
C. Pembahasan.....	75
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
A. Simpulan .....	81
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	44

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Sampel Perusahaan .....	46
2. <i>Spread</i> Perusahaan Manufaktur (%) .....	59
3. Total Penjualan Perusahaan Sampel .....	62
4. Proporsi Dewan Komisaris Independen.....	64
5. Statistik Dekskriptif .....	67
6. Uji Normalitas.....	68
7. Uji Multikolinearitas .....	69
8. Uji Heterokedastisitas .....	70
9. Uji Autokorelasi.....	71
10. Uji Koefisien Determinasi .....	72
11. Uji F .....	72
12. Uji Koefisien Regresi.....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data-data Asimetri Informasi .....	85
2. Data-data Ukuran Perusahaan.....	87
3. Data-data Komisaris Independen.....	89
4. Hasil Olahan data (out put) SPSS versi 15 .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum perusahaan tidak terlepas dari pihak-pihak seperti manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Manajemen (*agent*) sebagai pihak yang mendapatkan tugas untuk mengelola dana dari pemilik (*principal*) dan menjalankan perusahaan dengan baik, harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Di lain pihak, pemilik (*principal*) sebagai pemberi tugas dan tanggung jawab akan memberikan insentif kepada manajemen baik berupa fasilitas finansial maupun non finansial.

Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh pemilik (*principal*) untuk mengambil keputusan dalam hal pemberian insentif. Manajemen (*agent*) yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi, dan seringkali akses terhadap informasi internal perusahaan terbatas untuk memperoleh informasi yang lengkap seperti yang diinginkan oleh pemilik (*principal*). Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor seperti: biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari risiko terhadap kelemahan kinerjanya, waktu untuk menyajikan informasi, dan sebagainya. Hubungan yang timbul antara satu pihak (*principal*) yang menyewa pihak lain

(*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa, dan *principal* juga mendelegasikan wewenang pembuatan keputusan pada *agent* dalam konsep teori agensi disebut hubungan agensi (Supriyono, 2000).

Teori agensi berpendapat bahwa pentingnya pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*) untuk menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga yang profesional yang lebih menguasai dalam hal pengelolaan bisnis (*agency*). Pemisahan tersebut bertujuan untuk mengefisienkan perusahaan, dengan dikelola oleh *agency* yang profesional diharapkan biaya menjadi minimal dan keuntungan perusahaan menjadi maksimal sesuai dengan keinginan *principal*. Teori keagenan (*agency theory*) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai *agent* dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai *principal*. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Supriyono (2000) dalam teori keagenan (*agency theory*) menyatakan asimetri informasi merupakan situasi yang terbentuk karena *principal* (dalam hal ini adalah pemegang saham) tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja *agent* (dalam hal ini adalah manajer) sehingga *principal* tidak pernah dapat menentukan kontribusi usaha *agent* terhadap hasil-hasil perusahaan yang sesungguhnya. Suwarjono (2005) mengatakan bahwa karena manajemen dan investor/kreditor merupakan pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dapat dipandang sebagai hubungan keagenan, dikhawatirkan

akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi.

Adanya asimetri informasi ini memicu terjadinya konflik antara manajemen dan pemegang saham ataupun antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas (Evi, 2008). Serupa dengan teori keagenan yang menganggap informasi sebagai komoditi yang dapat dibeli sehingga manajer sebagai pihak yang memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pihak lainnya memiliki *bargaining power* yang besar untuk melakukan *moral hazard* dan *adverse selection*.

Perbedaan preferensi antara *principal* dengan *agent* dan juga informasi pribadi *agent*, *agent* mungkin memberikan risiko moral (*moral hazard*). Risiko moral (*moral hazard*) adalah kesenjangan *agent* untuk menyajikan informasi yang salah pada *principal*. Risiko moral menimbulkan situasi yang mengakibatkan *agent* dikendalikan oleh motivasi untuk membuat kesalahan dalam menyajikan informasi pribadinya melalui sifat sistem pengendalian. Supriyono (2000) dalam teori agensi menyatakan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan tujuan dan asimetri informasi dapat digunakan dua cara pokok yaitu: a) pemantauan, dan b) insentif.

Salah satu mekanisme pengendalian adalah pemantauan. Pemantauan dapat dilakukan oleh komisaris independen sebagai organ tambahan dari *good corporate governance*. Menurut Indra, dkk (2006:138), bahwa diantara tugas komisaris independen adalah memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota

komisaris. Tugas ini memberikan perlindungan hak-hak pemegang saham, seperti dalam memperoleh informasi. Selain itu, memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan. Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kanagaretnam et.al (2007), menyatakan bahwa perubahan penurunan asimetri informasi diharapkan dapat lebih rendah untuk perusahaan besar, dikarenakan pada perusahaan besar lebih banyak tersedia informasi publik yang berguna bagi para pemakai informasi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi, dimana perusahaan yang berukuran besar dituntut untuk membagikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada *stakeholders* yang ada dalam perusahaan.

Menurut Jaelani (2001) dalam Suryani (2007), ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan atau organisasi. Ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah total penjualan perusahaan (Elyana, 2007).

Besarnya perusahaan (*firm size*) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat informasi asimetri perusahaan, karena perusahaan yang memiliki kekayaan yang relatif besar akan berusaha membagikan informasi perusahaan pada investor. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan *asymmetric information* yang bisa terjadi antara perusahaan dengan investor (Nirmala, 2009).

Modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Manajemen sebagai pengelola perusahaan perlu kepastian dari investor bahwa dana tersebut digunakan secara efisien. Di lain pihak investor juga perlu memperoleh kepastian bahwa manajemen bertindak secara profesional dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan *corporate governance* (Indra, dkk 2006). Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan merupakan salah satu elemen penting dalam *corporate governance*. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi antara pihak internal perusahaan (manajemen perusahaan dan pemegang saham) dengan pihak eksternal (kreditor dan pemegang saham minoritas). Dengan berkurangnya asimetri informasi, maka masalah-masalah *moral hazard* dapat dibatasi dan selanjutnya akan memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. (Darmawati, 2006).

*Corporate governance* merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham memperoleh informasi yang benar, akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders*. *Good corporate governance* mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. Menurut Wahyudin (2008:36), *good corporate governance* merupakan sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara

pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*. Dengan diterapkannya prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan sehingga kepercayaan para pengguna laporan keuangan dapat meningkat termasuk di antaranya para pemegang saham.

Empat prinsip dasar *good corporate governance* seperti yang dikemukakan oleh OECD dalam Evi (2008) yaitu *transparency*, *fairness*, *accountability* dan *responsibility* dapat mendukung terwujudnya *good corporate governance* yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham. Prinsip *good corporate governance* memiliki korelasi yang kuat dengan kepentingan para pemegang saham, salah satunya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam keputusan investasinya, bahkan dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai penopang utama pemenuhan beragam kepentingan para pemegang saham suatu perusahaan. *Good corporate governance* ini didukung oleh organ-organ di dalamnya seperti keberadaan komite audit dan dewan komisaris. Telah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan publik untuk memiliki komite audit dan komisaris independen

dalam organ perusahaan. Hal ini tercantum dalam peraturan BAPEPAM bagi perusahaan publik. Menurut Tjager (2003:107), “Adanya keharusan perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen dan komite audit diatur dalam Surat Edaran Ketua BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2000 Tanggal 5 Mei 2000”.

Adapun fenomena yang terjadi belakangan ini diantaranya, banyak perusahaan emiten yang tidak menjalankan mekanisme keterbukaan informasi yang dimiliki oleh perusahaan (manajemen) sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh regulator, salah satunya yang diberlakukan oleh BAPEPAM, sehingga menyebabkan tingginya tingkat asimetri informasi. Seperti kasus anjloknya harga saham PT. Perusahaan Gas Negara Tbk pada akhir tahun 2006. Anjloknya harga saham perusahaan diduga adanya unsur kesengajaan dalam hal pola pembiaran pembentukan harga saham PGN, di mana dari prediksi CLSA (*Credit Lyonnais Securities Asia*) diawal tahun yang optimistis namun diikuti aksi jual, sebaliknya Meril Lynch yang merekomendasikan negatif malah mengambil posisi beli. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PGN, Meneg BUMN bertindak ceroboh dan tidak menerapkan prinsip GCG dan pengangkatan komisaris dan direksi. Hal ini menjadi salah satu skenario *insider trading* (Nasril, 2007). Kejadian ini mengindikasikan adanya informasi yang disembunyikan oleh pihak-pihak yang memiliki informasi atas kondisi PGN yang sesungguhnya dari publik. Sehingga terjadilah kondisi yang disebut asimetri informasi antara pihak yang berkepentingan. Adanya indikasi *insider trading* yang dilakukan oleh orang

dalam PGN itu sendiri yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Bapepam nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

Berbagai masalah yang disebabkan oleh asimetri informasi ini telah mendorong diadakannya penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Kanagaretnam et.al (2007), yang menguji pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap berkurangnya asimetri informasi. Penelitian Kanagaretnam et.al (2007) meneliti hubungan antara kualitas *corporate governance* dan perubahan asimetri informasi dalam ekuitas pasar selama pengumuman laba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa keefektifan dewan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, hal ini akan mengurangi informasi asimetri. Evi (2008) menguji keterkaitan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam hubungannya dengan asimetri informasi, yang menunjukkan hasil bahwa prinsip tanggung jawab secara signifikan berpengaruh terhadap asimetri informasi yang merupakan replikasi dari penelitian Kanagaretnam et.al (2007) untuk diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2006) bahwa variabel *size* (ukuran perusahaan) tidak mampu menjadi variabel kontrol yang dapat mempengaruhi antara manajemen laba dan asimetri informasi, sehingga ukuran perusahaan bisa dijadikan variabel independen. Oleh karena itu, peneliti memasukkan ukuran perusahaan sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini.

Kelompok industri dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti mengambil perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yelly (2008) bahwa perusahaan manufaktur dianggap perusahaan yang lebih banyak pemakainya dan pada umumnya perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI merupakan perusahaan-perusahaan besar, seperti PT Unilever Indonesia Tbk, PT Aqua Golden Mississippi Tbk, PT HM Sampoerna Tbk, dan masih banyak perusahaan manufaktur lainnya yang menguasai pasar industrinya. Perusahaan besar tentunya menjanjikan *return* yang lebih tinggi, oleh karena itu tentunya para investor banyak yang melirik pada perusahaan manufaktur. Sebagai perusahaan besar dengan banyak pemilik sahamnya, pihak perusahaan dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan publik terutama para investornya, dengan cara memberikan informasi-informasi mengenai kondisi perusahaan yang dibutuhkan oleh investor untuk kepentingan investasi mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Asimetri Informasi pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sejahteramana pengaruh pengumuman laba terhadap asimetri informasi?
2. Sejahteramana pengaruh pengungkapan terhadap asimetri informasi?
3. Sejahteramana pengaruh ukuran perusahaan terhadap asimetri informasi?
4. Sejahteramana pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap asimetri informasi?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian pada pengaruh ukuran perusahaan dan penerapan *good corporate governance* terhadap asimetri informasi.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sejahteramana pengaruh ukuran perusahaan terhadap asimetri informasi?
- 2) Sejahteramana pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap asimetri informasi?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap asimetri informasi
2. Pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap asimetri informasi.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti:
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Padang.
  - b. Menambah pengetahuan serta memahami tentang pengaruh ukuran perusahaan dan penerapan *good corporate governance* terhadap asimetri informasi.
2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan:
  - a. Menambah pengetahuan tentang pengaruh ukuran perusahaan dan penerapan *good corporate governance* terhadap asimetri informasi.
  - b. Dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan materi perkuliahan sebagai tambahan ilmu dari realita yang ada.
  - c. Sebagai sumbangan ilmiah dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan sebagai bahan informasi awal bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.

3. Bagi para praktisi:
  - a. Bagi emiten dan calon emiten: menambah pengetahuan mengenai pengungkapan agar informasi-informasi yang disajikan dalam laporan tahunannya berguna bagi analis sekuritas dan investor dalam rangka pengambilan keputusan investasi.
  - b. BAPEPAM dan Komite Penyusunan SAK: membantu regulator dalam mengevaluasi regulasi-regulasi dan standar akuntansi yang telah dikeluarkan. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengeluarkan regulasi-regulasi dan standar akuntansi di masa yang akan datang.
  - c. Investor: memberikan masukan dalam rangka pengambilan keputusan investasi atau divestasi atas saham-saham yang tercatat dan diperdagangkan di bursa.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

#### A. KAJIAN TEORI

##### 1. Asimetri Informasi dan Teori *Bid-Ask Spread*

###### a. Pengertian Asimetri Informasi

Anthony dan Govindarajan (2005) dalam teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. *Agent* diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti luang waktu yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel.

Menurut Supriyono (2000) asimetri informasi adalah :

“Situasi yang terbentuk karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen sehingga prinsipal tidak pernah dapat menentukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan yang sesungguhnya”.

Sedangkan Scott (1997) menyatakan bahwa ;

“Apabila beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis, lebih memiliki informasi dibanding pihak lainnya maka kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi (*information asymetry*)”.

Menurut Supriyono (2000) asimetri informasi dapat timbul dalam beberapa bentuk:

- a. Tanpa pemantauan, hanya *agent* yang mengetahui apakah bekerja dengan baik demi kepentingan *principal*.

- b. *Agent* mungkin mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan daripada prinsipalnya.
- c. *Agent* dalam melaksanakan tugasnya mungkin diarahkan oleh informasi pribadi.

Oleh karena itu, perbedaan preferensi antara *principal* dengan *agent* dan juga informasi pribadi *agent*, mungkin agen memberikan risiko moral (*moral hazard*). Risiko moral (*moral hazard*) adalah kesenjangan *agent* untuk menyajikan informasi yang salah pada *principal*. Risiko moral menimbulkan situasi yang mengakibatkan *agent* dikendalikan oleh motivasi untuk membuat kesalahan dalam menyajikan informasi pribadinya melalui sifat sistem pengendalian.

Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada *agent* tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan *principal* dan manajer adalah *agent* mereka. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa *principal* dan *agent* memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda.

*Agent* dan *principal* juga berbeda dalam hal preferensi risiko. Teori agensi mengasumsikan bahwa manajer memilih lebih banyak daripada lebih sedikit kekayaan, tetapi bahwa utilitas marginal, atau kepuasan, menurun dengan semakin banyaknya kekayaan yang diakumulasikan. *Agent* biasanya memiliki sebagian besar dari kekayaan mereka terkait dengan kekayaan

perusahaan. Kekayaan ini terdiri dari baik yang berasal dari kekayaan keuangan mereka maupun modal manusia mereka. Modal manusia berarti nilai manajer sebagaimana dipandang oleh pasar yang dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Karena semakin menurunnya utilitas atas kekayaan dan besarnya jumlah modal *agent* yang bergantung pada perusahaan, *agent* diasumsikan akan bersifat enggan menghadapi risiko (*risk averse*). Mereka menilai peningkatan dari investasi berisiko lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan nilai (nilai aktuarial) dari investasi tersebut.

Perbedaan preferensi yang terkait dengan kompensasi dan tambahan timbul manakala *principal* tidak dapat dengan mudah memantau tindakan *agent*. Pemegang saham tidak berada dalam posisi untuk memantau aktivitas CEO setiap harinya untuk memastikan bahwa ia bekerja untuk kepentingan mereka. Di lain pihak, CEO tidak berada dalam posisi untuk memantau aktivitas manajer unit bisnis setiap harinya.

Karena *principal* tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja *agent*, *principal* tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha *agent* memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi ini disebut asimetri informasi. Tanpa memantau, hanya *agent* yang mengetahui apakah ia bekerja untuk kepentingan *principal*. Lebih lanjut lagi, *agent* yang mengetahui lebih banyak mengenai tugas tersebut dibandingkan dengan *principal*. Tambahan informasi yang mungkin dimiliki oleh *agent* disebut dengan informasi pribadi.

Perbedaan preferensi antara *principal* dan *agent*, dan informasi pribadi *agent*, dapat menyebabkan *agent* tersebut salah menyajikan informasi kepada *principal*. Salah penyajian ini adalah sedemikian rupa sehingga istilah bahaya moral telah diberikan atas situasi ketika seorang *agent* yang dikendalikan termotivasi untuk salah menyajikan informasi karena sifat sistem pengendalian.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Puput (2001) menambahkan bahwa jika kedua kelompok (*agent* dan *principal*) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa *agent* tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan *principal*. *Principal* dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi *agent* dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas *agent* yang menyimpang.

Menurut Scott (2000) dalam Rahmawati (2006) membagi dua tipe asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

#### 1. *Adverse Selection*

*Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi yang mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan/akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insider*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

## 2. *Moral Hazard*

*Moral hazard* adalah jenis asimetri informasi yang mana satu pihak atau lebih yang menghasilkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka, sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

Hubungan agensi dikatakan terjadi ketika sebuah kontrak antara seseorang (atau beberapa orang), seorang *principal*, dan seseorang (atau beberapa orang) lain, seorang *agent*, untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan *principal* mencakup pada sebuah pendelegasian kewenangan pembuatan keputusan kepada *agent*. Baik *principal* maupun *agent* diasumsikan mementingkan diri sendiri, yaitu untuk memaksimalkan utilitas subjek mereka, tetapi juga menyadari kepentingan umum mereka. *Agent* berusaha untuk memaksimalkan *fee* kontraktual yang diterimanya tergantung pada tingkat upaya yang diperlukan. *Principal* berusaha untuk memaksimalkan *returns* dari penggunaan sumber dayanya tergantung pada *fee* yang dibayarkan pada *agent*. Konflik kepentingan ini diasumsikan akan dibawa ke arah ekuilibrium dengan kontrak yang disetujui. Kontrak mengikat anggota-anggota untuk menyetujui seperangkat perilaku kerjasama, tergantung motif mementingkan diri sendiri. Dua alasan mungkin menyebabkan terjadinya divergensi antara perilaku mementingkan diri

sendiri dan kerjasama, *adverse selection* dan *moral hazard*, yang merupakan masalah berbasis informasi.

*Adverse selection*, sebagai sebuah masalah informasi, timbul ketika *agent* menggunakan informasi privat yang tidak dapat diverifikasi oleh *principal* untuk mengimplementasikan secara berhasil sebuah aturan masukan-tindakan yang berbeda dari yang diinginkan oleh *principal* sehingga membuat *principal* tidak mampu menentukan apakah *agent* membuat pilihan yang tepat. Masalah *moral hazard*, sebagai sebuah masalah informasi *ex post*, timbul ketika ada masalah motivasional dan konflik sebagai akibat mendasarkan kontrak pada perilaku yang tidak sempurna.

Jika asimetri informasi dikaitkan dengan pengungkapan, maka asimetri informasi yang terjadi yaitu *adverse selection*. Informasi dalam laporan keuangan dapat menurunkan *adverse selection* dengan cara memindahkan informasi privat yang dimiliki oleh manajemen menjadi informasi publik. Laporan keuangan sebagai sarana informasi ditujukan untuk mengurangi asimetri informasi.

#### **b. Teori *Bid-Ask Spread***

Eisenhardt (1989) dalam Arief (2007) mengemukakan tiga rumus sifat dasar manusia yaitu:

- 1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
- 2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).

3) Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

Dalam mekanisme pasar modal, pelaku pasar juga menghadapi masalah keagenan. Partisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna mewujudkan tujuannya, membeli atau menjual sekuritas. Aktivitas yang mereka lakukan utamanya dipengaruhi oleh informasi yang diterima baik secara langsung (laporan publik) maupun tidak langsung (*insider trading*). *Dealer* atau *market-makers* sebagai salah satu partisipan pasar modal memiliki daya pikir terbatas terhadap persepsi masa yang akan datang, dan menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan pedagang terinformasi (*informed traders*) karena mereka tidak memiliki informasi *superior* sebagaimana pedagang terinformasi. Jadi dapat dikatakan bahwa asimetri informasi yang terjadi antara *dealer* dan pedagang terinformasi tercermin pada *spread* yang ditentukannya. Model asimetri informasi tersebut juga mengimplikasikan bahwa pengungkapan publik dari peristiwa yang mengubah asimetri informasi seharusnya disertai dengan penurunan *spread dealer*.

Studi empiris mengenai perilaku pasar saham beserta pelakunya telah banyak diteliti, salah satu objek perilaku pasar saham yang telah banyak diteliti adalah perilaku *bid-ask spread* harga saham. Menurut Mardiyah (2002) *bid-ask spread* merupakan selisih harga beli tertinggi dengan harga jual terendah saham *trader*. *Stoll* (1989) dalam Mardiyah (2002) menyatakan

bahwa *bid-ask spread* merupakan fungsi dari tiga komponen biaya yang berasal dari:

a. Pemilikan saham (*inventory holding*)

Biaya pemilikan menunjukkan *trade-off* antara memiliki terlalu banyak saham dan terlalu sedikit saham. Atas biaya pemilikan saham tersebut akan menimbulkan *opportunity costs*.

b. Pemrosesan pesanan (*order processing*)

Biaya pemrosesan pesanan meliputi biaya administrasi, pelaporan, proses komputer, telepon, dan lainnya.

c. Asimetri informasi

Biaya asimetri informasi lahir karena adanya dua pihak *trader* yang tidak sama dalam memiliki dan mengakses informasi.

Penelitian ini memfokuskan pada fungsi yang ketiga yaitu asimetri informasi. Pengukuran terhadap asimetri informasi seringkali diproksikan dengan *bid-ask spread* disebabkan asimetri informasi tidak dapat diobservasi secara langsung. Pihak pertama adalah *informed trader* yang memiliki informasi *superior* dan pihak lain yaitu *uninformed trader* yang tidak memiliki informasi. Jika kedua belah pihak bertransaksi maka *uninformed trader* menghadapi risiko rugi jika bertransaksi dengan *informed trader*, upaya mengurangi risiko tersebut tercermin dalam *bid-ask spread*.

Menurut Baridwan (2001) dan Mardiyah (2002) Asimetri informasi diukur dengan menggunakan *relative bid-ask spread*. Dimana asimetri informasi dilihat dari selisih harga saat *ask* dengan harga *bid* saham

perusahaan atau selisih harga jual dan harga beli saham perusahaan selama satu tahun yang dioperasikan sebagai berikut :

$$SPREAD_{i,t} = (ask_{i,t} - bid_{i,t}) / \{(ask_{i,t} + bid_{i,t}) / 2\} \times 100\%$$

Dimana :

*SPREAD* = selisih harga saat *ask* dengan harga *bid* perusahaan i pada tahun t.

*Ask<sub>i,t</sub>* = harga *ask* tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada tahun t.

*Bid<sub>i,t</sub>* = harga *bid* terendah saham perusahaan i yang terjadi pada tahun t.

## 2. Ukuran Perusahaan

Brigham dan Houston (2001:119) mendefinisikan *size* atau ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan.

Ukuran perusahaan (*size*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar kecilnya suatu objek. Menurut Poerwadarminta (1983) dalam Hanisyah (2007) ukuran perusahaan diartikan sebagai:

1. alat-alat untuk mengukur (seperti meter, jengkal, dan sebagainya).
2. sesuatu yang dapat dipakai untuk menentukan (menilai dan sebagainya).

3. pendapatan mengukur panjangnya (lebar, luas, besar) sesuatu.

Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan dan organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi.

Menurut keputusan BAPEPAM Nomor 9 Tahun 1995, berdasarkan ukurannya perusahaan dapat digolongkan atas dua kelompok:

1. Perusahaan Menengah/Kecil

Perusahaan menengah/kecil merupakan badan hukum yang diartikan di Indonesia yang:

- a. Memiliki *total asset* tidak lebih dari Rp 20 miliar.
- b. Bukan merupakan afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil.
- c. Bukan merupakan reksadana.

2. Perusahaan Menengah/Besar

Perusahaan menengah/besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil. Alasan lainnya adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya produksi informasi yang lebih rendah yang berkaitan dengan pengungkapan mereka atau biaya *competitive disadvantage* yang lebih rendah pula.

Perhatian investor terhadap perusahaan besar ditujukan pada kemungkinan adanya *opportunities* untuk mengembangkan dana yang mereka miliki, bila diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Perhatian pemerintah terhadap perusahaan besar tertuju pada harapan adanya pembayaran pajak yang cukup besar sebagai penerimaan negara. Sedangkan perhatian para analis ekonomi terhadap perusahaan besar terletak pada peranan dan kontribusi perusahaan terhadap roda perekonomian suatu negara.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total penjualan. Menurut Suwardjono (2005) bahwa secara umum penjualan merupakan transaksi pertukaran barang atau jasa hasil produksi perusahaan dengan kas atau klaim atas kas. Dalam aspek finansial, penjualan dapat dilihat dari sisi perencanaan dan sisi realisasi yang diukur dalam satuan rupiah. Dalam sisi perencanaan, penjualan direfleksikan dalam bentuk target yang diharapkan dapat direalisasi oleh perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2006) bahwa variabel *size* (ukuran perusahaan) tidak mampu menjadi variabel kontrol yang dapat mempengaruhi antara manajemen laba dan asimetri informasi, sehingga ukuran perusahaan bisa dijadikan variabel independen.

Menurut Sumardji (2007) besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut.

Semakin besar penjualan maka semakin banyak modal yang ditanam, dan kas semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat.

### **3. *Good Corporate Governance (GCG)***

#### **a. *Pengertian Good Governance Corporate***

Secara umum, *good corporate governance* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat.

Dalam Sutojo (2008:2) terdapat beberapa pengertian *good corporate governance* (GCG), diantaranya:

1) Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD)

*Corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham.

2) Menurut *Australian Stock Exchange* (ASX)

*Corporate governance* merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. *Corporate governance* juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal

serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi perusahaan.

3) Menurut Jill Solomon and Aris Solomon

*Corporate governance* merupakan sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan (diwakili oleh *Board of Directors*) dengan pemegang saham. *Corporate governance* juga mengatur hubungan dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas perusahaan kepada seluruh anggota *stakeholders* non-pemegang saham.

4) Menurut *Forum For Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan

*Corporate Governance* tahun 2006 adalah:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

5) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP117/M-MBU/2002 tentang

penerapan praktik GCG di BUMN mendefinisikan GCG sebagai berikut:

Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi

korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

**b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Menurut OECD dalam Evi (2008) ada empat prinsip dasar *good corporate governance*, yaitu:

**a. Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi adalah keterbukaan mengenai informasi kinerja perusahaan, baik ketepatan waktu maupun akurasinya. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan.

Praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya perusahaan wajib untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana atau kebijakan perusahaan yang dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada seluruh pihak struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi.

**b. Kewajaran (*Fairness*)**

*Fairness* yaitu kepastian perlindungan atas hak seluruh pemegang saham dari penipuan (*fraud*) dan penyimpangan lainnya serta adanya pemahaman yang jelas mengenai hubungan berdasarkan kontrak diantara sumber daya perusahaan dan pelanggan.

Praktik kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak.

Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari kecurangan (*fraud*) dan praktik *insider trading*.

**c. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas yaitu penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian wewenang, peranan, hak, dan tanggung jawab dari pemegang saham, direksi, manajer, dan auditor.

Praktik-praktik diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengangkatan komisaris independen merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.

**d. Responsibilitas (*Responsibility*)**

Responsibilitas berarti pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Responsibilitas juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sanksi hukum maupun moral.

Prinsip-prinsip di atas diterjemahkan ke dalam enam aspek yang dijabarkan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) sebagai pedoman pengembangan kerangka kinerja legal,

institusional, dan regulatori untuk *corporate governance* di suatu negara.

Keenam aspek tersebut dalam Evi (2008) antara lain:

- 1) Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja *corporate governance*.

Kerangka kerja *corporate governance* mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efektif sejalan dengan ketentuan perundangan dan menyampaikan dengan jelas pembagian tanggung jawab diantara para pihak seperti pengawas, regulator, dan otoritas penegakan hukum.

- 2) Hak-hak pemegang saham dan kerangka kepemilikan

Hak-hak para pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi. Dalam hal ini kerangka kerja *corporate governance* harus bisa melindungi hak-hak para pemegang saham dari kecurangan.

- 3) Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham

Seluruh pemegang saham terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus mendapatkan perlakuan yang sama. Semua pemegang saham memiliki kesempatan yang sama apabila hak-haknya dilanggar.

- 4) Peran *stakeholders* dalam *corporate governance*

Hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerja sama aktif antara perusahaan dan *stakeholders* harus dikembangkan dalam upaya

bersama untuk menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan.

5) Pengungkapan dan transparansi

Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

6) Tanggung jawab pengurus perusahaan

Pengawasan manajemen dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham harus berjalan efektif. Selain itu, adanya tuntutan strategik terhadap manajemen serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Secara keseluruhan konsep *good corporate governance* timbul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dengan menciptakan mekanisme dan alat kontrol yang memungkinkan terciptanya sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi *stakeholders* dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan.

Terdapat dua mekanisme dalam penerapan *good corporate governance* yaitu mekanisme intern dan mekanisme ekstern. Mekanisme intern berkaitan dengan pengendalian intern perusahaan khususnya peranan dewan komisaris. Mekanisme intern lainnya yaitu penunjukkan anggota dewan direktur dan dewan komisaris yang beranggotakan auditor

independen dan staf internal audit. Sedangkan mekanisme ekstern yaitu mekanisme kontrol yang memanfaatkan semua perangkat yang ada di luar perusahaan, baik ekonomi, hukum dan sosial untuk mengontrol jalannya perusahaan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

### c. **Kode *Good Corporate Governance***

Menurut Sutojo (2008:23):

Kode *good corporate governance* tersebut (yang memperhatikan penerapan *corporate governance* terbaik di dunia internasional sebagai bahan masukan) bertujuan menyajikan pedoman kepada masyarakat bisnis Indonesia tentang bagaimana menerapkan pedoman *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan mereka.

Dalam *Indonesian Code for Good Corporate Governance* antara lain dimuat hal-hal yang bersangkutan dengan:

#### a. Perlindungan Hak Pemegang Saham

Termasuk dalam hak pemegang saham, menurut kode *Indonesian good corporate governance* adalah:

1. Menghadiri rapat umum pemegang saham dan mengeluarkan pendapat (*vote*) tentang keputusan-keputusan rapat.
2. Mengeluarkan informasi tentang perusahaan secara reguler dan tepat waktu.

3. Secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, menerima dividen.

b. Dewan Komisaris

Fungsi utama dewan komisaris menurut *Indonesian Code for Good Corporate Governance* adalah memberikan supervisi kepada direksi dalam menjalankan tugasnya. Dewan komisaris juga berkewajiban memberikan pendapat dan saran apabila diminta direksi.

c. Direksi

Tugas utama direksi menurut *Indonesian Code for Good Corporate Governance* adalah mengelola perusahaan secara keseluruhan. Semua anggota direksi mempunyai kewajiban menerapkan prinsip *good corporate governance*.

d. Sistem Audit

Tugas komite audit antara lain adalah:

1. Meningkatkan mutu transparansi pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
2. Meninjau ruang lingkup, akurasi, efektivitas pembiayaan dan independensi eksternal auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.
3. Menyiapkan surat penetapan tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun yang bersangkutan.

e. Sekretaris Perusahaan

Tugas utama sekretaris perusahaan adalah menjaga perusahaan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengungkapan informasi perusahaan secara transparan. Sekretaris perusahaan juga bertugas secara periodik menyajikan data dan informasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas para anggota dewan komisaris dan direksi.

f. *The Stakeholders*

Termasuk dalam *the stakeholders* menurut *Indonesian Code for Good Corporate Governance* adalah pemegang saham, pelanggan, perusahaan pemasok, kreditur, karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan.

g. Prinsip Pengungkapan Informasi Perusahaan Secara Transparan

Salah satu sarana yang dipergunakan untuk mengungkapkan informasi perusahaan secara transparan kepada para pemegang saham, kreditur, investor dan penguasa pemerintah yang bersangkutan adalah laporan tahunan (antara lain memuat laporan keuangan).

h. Prinsip Kerahasiaan

Para anggota dewan komisaris dan direksi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan perusahaan.

i. Etika Binsis dan Korupsi

Dewan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan disarankan tidak memberikan atau menawarkan (secara langsung atau tidak langsung) hadiah kepada pelanggan atau pejabat pemerintah, dengan tujuan

mempengaruhi mereka untuk bertindak yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

j. Perlindungan Terhadap Lingkungan

Direksi wajib menjaga agar perusahaan dan sarana produksinya selalu mematuhi ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perlindungan hidup dan kesehatan, baik perlindungan bagi karyawan maupun masyarakat sekitar.

**d. Manfaat *Good Corporate Governance***

Menurut FCGI (2003), ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan melaksanakan *good corporate governance*, antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembayaran yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's value* dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama privatisasi.

#### e. Komisaris Independen

Istilah komisaris independen bukan menunjukkan bahwa komisaris yang lain tidak independen. Istilah komisaris independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili investor. Komisaris independen memiliki *fiduciary duty* yang timbul dari hubungan *fiduciary* untuk memerhatikan kepentingan perusahaan secara sungguh-sungguh.

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen maka harus ada sistem yang baik yaitu *Good Corporate Governance* yang mewajibkan keberadaan komisaris independen.

Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris (pada umumnya). Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian komisaris independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

”Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.”

Ada dua kriteria persyaratan seseorang menduduki jabatan komisaris independen. Kriteria atau syarat komisaris independen yaitu:

a. Kriteria komisaris independen menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), yaitu:

1. komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;
3. komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
4. komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
5. komisaris independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;

6. komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
  7. komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.
- b. Kriteria komisaris independen menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Jakarta tanggal 19 Juli 2004, yaitu:
1. jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris;
  2. komisaris independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten pada perusahaan publik;
  3. komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama dari perusahaan tercatat yang bersangkutan;
  4. komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan;
  5. komisaris tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan atau

hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tercatat;

6. komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
7. komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama meliputi:

1. menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*);
2. menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*);

3. memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transparansi perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*);
4. memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan dimana perlu. Komisaris independen harus melaksanakan transparansi (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) atas hal ini;
5. memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (*OECD principles of Corporate Governance*). Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

*Good corporate governance* dapat diukur melalui keberadaan komisaris independen yang diukur dengan persentase jumlah komisaris independen di dalam perusahaan dengan rumus:

$$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total jumlah komisaris}} \quad (\text{KNKG, 2004})$$

Jumlah minimal komisaris independen dalam suatu perusahaan menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Jakarta Tanggal 19 Juli 2004 sebesar 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

*Good corporate governance* juga mengukur melalui kepemilikan manajerial melalui rumus MOWN (Itturiaga dan Sanz, 1998) dalam Fakhrial (2007:23) dan rumus INSOWN (Linda, 2004).

$$\text{MOWN} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki komisaris dan direksi}}{\text{Total saham}}$$

$$\text{INSOWN} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor institusional}}{\text{Total saham}}$$

#### 4. Hasil Penelitian yang Relevan

Kanagaretnam et.al (2007), yang menguji pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap berkurangnya asimetri informasi. Penelitian Kanagaretnam, et.al (2007) meneliti hubungan antara kualitas *corporate governance* dan perubahan asimetri informasi dalam ekuitas pasar selama pengumuman laba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa keefektifan dewan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, hal ini akan mengurangi informasi asimetri.

Evi (2008) menguji keterkaitan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam hubungannya dengan asimetri informasi, yang menunjukkan hasil bahwa prinsip tanggung jawab secara signifikan berpengaruh terhadap asimetri informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar bereaksi secara positif terhadap pengungkapan informasi *corporate social responsibility*. Sedangkan prinsip transparansi, kewajaran, dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap asimetri informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya dewan komisaris dan komite audit dalam suatu perusahaan belum dinilai cukup efektif untuk melakukan pengawasan.

## 5. Hubungan Ukuran Perusahaan dan Asimetri Informasi

Rajan dan Zingales (1995) dalam Sugiarto (2009:121) menyatakan bahwa *firm size* yang merupakan proksi bagi asimetri informasi antara perusahaan dan pasar memunculkan sinyal dari perusahaan tersebut, karena perusahaan yang memiliki kekayaan yang relatif besar akan berusaha membagikan informasi perusahaan pada investor yang bertujuan untuk mengurangi *asimetric information* yang bisa terjadi antara perusahaan dengan investor.

Kanagaretnam et.al (2007), menyatakan bahwa perubahan penurunan asimetri informasi terjadi pada perusahaan yang berukuran besar, dikarenakan pada perusahaan besar lebih banyak tersedia informasi publik. Sehingga semakin besar perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan asimetri informasi itu terjadi.

Herlina (2008) menyatakan bahwa penurunan asimetri informasi dan biaya modal akibat pengaruh pengungkapan laporan keuangan ini dengan memasukkan *firm size* sebagai variabel kontrol, lebih besar bagi kelompok perusahaan besar dan lebih kecil bagi kelompok perusahaan kecil. Artinya bahwa perusahaan yang besar cenderung melakukan pengungkapan dan membagikan informasi yang ada, hal ini dapat mengurangi asimetri informasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas dapat diduga bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung membagikan informasinya kepada *stakeholders*, sehingga tingkat asimetri informasi semakin kecil.

## 6. Hubungan *Good Corporate Governance* dan Asimetri Informasi

Prasetyantoko (2008), bahwa dalam teori agensi terdapat pemisahan antara kepemilikan perusahaan dan pengelolaan perusahaan. Dalam konteks pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tersebut, selalu muncul masalah dimana kepentingan para pengelola tidak selalu selaras dengan kepentingan pemilik modal. Selain itu, selalu ada persoalan ketimpangan informasi (asimetri informasi) antara pemilik modal dan pengelola perusahaan.

*Corporate governance* merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, tepat, waktu, dan transparan mengenai semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*. Menurut Indra, dkk (2006) untuk melindungi kepentingan pemegang saham, salah satunya adalah menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas maka harus ada sistem yang baik yaitu *good corporate governance* yang mewajibkan keberadaan komisaris independen.

Kanagaretnam et.al (2007), yang meneliti hubungan antara kualitas *corporate governance* dan perubahan asimetri informasi dalam ekuitas pasar selama pengumuman laba, dengan memakai komisaris independen sebagai salah satu proksi dari mengukur *good corporate governance*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ada pengaruh negatif antara asimetri informasi dan *good corporate governance*.

Evi (2008) yang menguji keterkaitan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam hubungannya dengan asimetri informasi, yang menunjukkan prinsip tanggungjawab berpengaruh secara signifikan terhadap asimetri informasi. Tanggungjawab berarti pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Hasil ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* sangat dihargai oleh pelaku pasar modal Indonesia sebagai perilaku yang sangat penting sehingga secara signifikan dapat mempengaruhi adanya informasi asimetri. Informasi mengenai tanggungjawab suatu perusahaan menjadi pertimbangan penting yang direspon positif oleh pelaku pasar modal. Arah pengaruh yang berlawanan menunjukkan bahwa semakin besar tanggungjawab suatu perusahaan maka semakin kecil asimetri informasi.

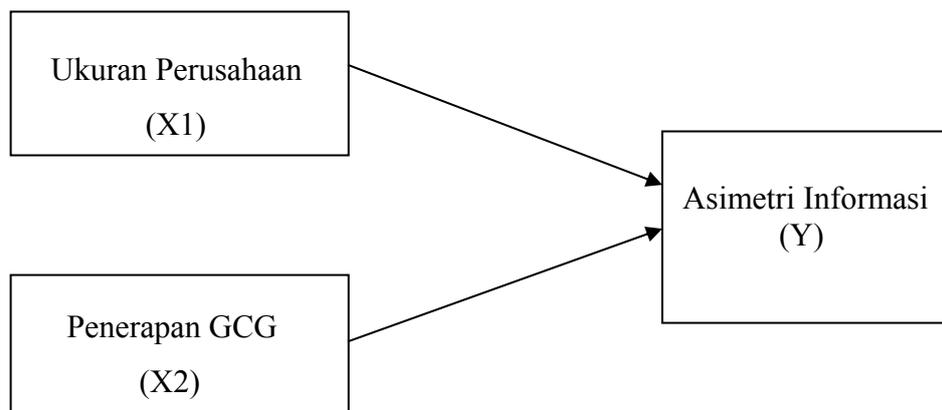
Dari penjelasan di atas, dapat diduga bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* dan organ tambahannya seperti komisaris independen dapat mengurangi tingkat asimetri informasi.

## **B. Kerangka Konseptual**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi tingkat asimetri informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Besarnya perusahaan (*firm size*) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat asimetri informasi, karena perusahaan yang memiliki kekayaan yang relatif lebih besar akan berusaha membagikan informasi perusahaan kepada investor yang bertujuan untuk mengurangi

asimetri informasi yang bisa terjadi antara perusahaan dengan investor. Sehingga ukuran perusahaan memiliki hubungan yang negatif dengan asimetri informasi.

Manajemen sebagai pihak yang mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar (pemegang saham) telah mengakibatkan adanya asimetri informasi yang memicu terjadinya konflik antara manajemen dan pemegang saham ataupun antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan suatu mekanisme salah satunya dengan menerapkan *corporate governance*. *Corporate governance* menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*. *Good corporate governance* muncul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku manajemen yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dengan adanya mekanisme dan alat kontrol memungkinkan terciptanya keseimbangan bagi *stakeholders* dan menciptakan efisiensi perusahaan. Sehingga diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi karena para *stakeholders* dapat memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Artinya penerapan *good corporate governance* yang semakin baik dapat menurunkan tingkat asimetri informasi.



**Gambar 1.**  
**Kerangka Konseptual**

### C. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji pengaruh ukuran perusahaan dan penerapan *good corporate governance* terhadap asimetri informasi. Oleh karena itu hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi.

Hipotesis 2 : Penerapan *good corporate governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh ukuran perusahaan dan penerapan *good corporate governance* terhadap asimetri informasi pada perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi pada perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
2. Penerapan *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi pada perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

#### **B. KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan selama 3 tahun, karena rentang waktu yang terbatas penelitian ini kurang dapat digeneralisir.

2. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling, sehingga sampel yang terpilih tidak semua perusahaan memiliki komisaris independen, meskipun BAPEPAM telah mengeluarkan peraturan agar perusahaan memiliki komisaris independen.
3. Pada penelitian ini masih terdapat kelemahan terhadap *proxy* yang dipakai untuk mengukur *good corporate governance* karena hanya menggunakan satu *proxy* yaitu keberadaan komisaris independen yang belum mampu untuk mewakili penerapan *good corporate governance*.
4. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen (ukuran perusahaan dan *good corporate governance*) yang mempengaruhi asimetri informasi.

Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, maka saran dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk penelitian yang sama, sebaiknya menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* agar diperoleh sampel yang lebih baik sesuai dengan data yang diinginkan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menambah *proxy* untuk mengukur *good corporate governance*, seperti dengan menggunakan komite audit, kepemilikan manajerial, dan menggunakan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikemukakan oleh IICG serta menggunakan indeks CGPI untuk menilai kualitas dari penerapan *good corporate governance*.

3. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, dengan melihat *Adjusted R Square* penelitian ini yang masih rendah maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan dan menggunakan variabel independen lain seperti manajemen laba, *leverage*, *return* saham, regulasi pengungkapan, dan pengumuman laba.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aldridge, E. John & Siswanto Sutojo. 2008. *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka
- Anthony, Robert N., & Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control System*, edisi ke-11. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardi Murduko Sudarmadji dan Lana Sularto. 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas *Voluntary Disclosure* Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT*. Vol. 2.
- Deni Darmawati. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Eugene, Brigham., & Joel, Houston. 2001. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Evi Dwi Astuti. 2008. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Asimetri Informasi. *Skripsi Universitas Gajah Mada*.
- Fakhrial. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan *Free Cash Flow* terhadap Utang. *Skripsi. Universitas Bung Hatta*.
- Hanisyah. 2007. Pengaruh Asimetri Informasi dan *Size* terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45. *Skripsi. Universitas Bung Hatta*.
- Herlina Wismaningsih. 2008. Pengaruh Regulasi Pengungkapan Laporan Keuangan Oleh Bapepam terhadap Asimetri Informasi dan Biaya Modal. *Thesis. Universitas Gajah Mada*.
- Husein Umar. 1999. Metode Penelitian untuk Skripsi dan *Thesis* Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indra Surya & Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.